

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan(*Agency theory*)

Teori keagenan(*agency theory*) pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi (*principal*) yaitu pemerintah daerah dan yang menjadi (*agent*) yaitu instansi BPKAD daerah provinsi Papua. Penelitian yang dilakukan oleh (Hestento, 2019) dimana pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal, hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah hubungan asimetris dimana variabel Kualitas Laporan Keuangan sangat mempengaruhi variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor. 71 Tahun 2010, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan pemerintah. SAP yang digunakan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas dan harus segera diganti dengan basis akrual Peraturan Pemerintah Nomor. 71

Tahun 2010 yang dianggap lebih akuntabel dan lebih mencerminkan prinsip *Good Government Governance/ Good Public Governance*.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010, para. 24).

Penelitian yang dilakukan oleh Nikke Yusnita Mahardini dan Ade Miranti (2018) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan juga kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu menurut Siska Marini Pilander, David Paul Elia Saerang dan Gamaliel (2018). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Papua.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung system pengendalian yang memadai. Pengertian Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (Mulyadi, 2017).

Definisi pengendalian intern menurut Sujarweni (2015) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian intern menurut IAPI (2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut PP Nomor. 60 Tahun 2008, definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Menurut Rai (2008) dalam Herawati (2014), sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah penerapan PP Nomor. 60 tahun 2008 kepada seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan yaitu dibentuknya *Standard Operating Procedures* (SOP). Menurut Permenpan Nomor. 21 Tahun 2008, SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian intern menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang di buat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian sistem pengendalian intern menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang di buat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam suatu organisasi.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut, Nurillah dan Muid (2014) mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi informasi yaitu komputer dan jaringan internet dalam mengolah data dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi agar dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan dan juga komputerisasi yang didukung dengan penggunaan aplikasi (*software*) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Ketika kesalahan pencatatan dapat diminimalisir dan penyajian laporan keuangan dapat lebih dipercepat membuat laporan keuangan semakin andal dan relevan sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Nurillah dan Muid (2014) dan Yosefrinaldi (2013) telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan teknologi informasi akuntansi menggunakan SIMAKDA dalam penyusunan laporan keuangan akan mempermudah penyusunan laporan

keuangan bagi Pemerintah Provinsi Papua sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Penggunaan Sistem SIMAKDA selama beberapa tahun terakhir pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua yang dirancang khusus oleh pemerintah pusat untuk proses penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.

Menurut, (Fitriana, 2012) menyatakan bahwa Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Ini juga termasuk dari perspektif pelaporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif. Serta Ketersediaan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung proses pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Menurut Krismiaji (2015:) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat memproses data dan transaksi yang berguna untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan suatu bisnis untuk dapat menghasilkan informasi yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan.” Menurut Kusriani dan Andi Koniyo (2007:) : “Sistem informasi akuntansi keuangan adalah sistem informasi akuntansi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya dengan ketepatan waktu, fleksibilitas dan daya audit.”

Indikator variable Sistem Informasi Teknologi : Menurut Sari (2014)
indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah :

1. Tingkat ketepatan Waktu
2. Tingkat Fleksibilitas
3. Tingkat efisiensi biaya dan
4. Tingkat Daya Audit

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM di lingkungan pemerintah merupakan hal yang penting dalam mencapai *good governance*. Kompetensi yang melekat pada masing-masing individu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan serta perilaku, seperti yang diatur pada “UU Nomor. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan” menyatakan bahwa “kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap orang, termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memenuhi standar”.

Kompetensi memiliki ciri atau karakteristik yang menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat bekerja secara optimal sesuai dengan bidangnya. Dalam “PERKA BKN Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil” menyatakan bahwa “kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan / atau fungsi jabatan”. Terdapat tiga karakteristik dari kompetensi SDM antara lain:

- (1) pengetahuan, (2) keterampilan, (3) sikap.

Menurut Penelitian yang dilakukan Indra Suyoto Kurniawan (2019) dengan judul Kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Faktor-faktor yang diteliti adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan Teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAKD), pemanfaatan system Teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yensi (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasnya. SDM yang berkompeten dapat bertanggung jawab atas tugas yang dikelolanya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar dan membuat laporan keuangan relevan dan andal,

sehingga semakin baik kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Nurillah dan Muid (2014) dan Hadiputro dan Octavia (2015) telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan maupun pengetahuan dan juga kemampuan. Menurut (Yosefrinaldi, 2013) sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang baik dan optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu karyawan mempunyai sifat yang baik dan selalu jujur, maka akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sehingga peran sumber daya manusia ini juga sangat mempengaruhi dalam sistematika kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Juita (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan bahwa sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia maka diperlukan pelatihan-pelatihan agar dengan adanya pelatihan tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kompetensi SDM yang berpengalaman di bidangnya dan juga memahami mengenai ilmu akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka Kompetensi Sumber Daya Manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Blanchard & Thacker (2004), skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

2.1.6 Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 telah menentukan beberapa karakteristik kualitatif pelaporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010 yaitu:

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut ini:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b) Andal

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut ini:

- 1) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Indikator variable Kualitas laporan Keuangan : Menurut Indra Bastian (2010:137) SAP memiliki indikator adalah sebagai berikut:

1. Regulasi,
2. Sumber daya manusia,
3. Sistem dan
4. Sarana Pendukung

.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang kemudian dikumpulkan dan dirangkum menjadi sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian

yang sejenis dengan penelitian diangkat sebagai masalah untuk dikaji lebih dalam, antara lain :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Magfirah Imalia* 1 , Indrawan Azis² , Nur Rachma³ (2023) dengan judul Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, Sistem Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sampel yang digunakan 56 orang dan alat analisis, adalah SPSS 21. Hasil penelitian Secara parsial variabel Penerapan Standar akuntansi pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan internal bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Jecklin Lorenza Emana , Lukman Pakayab , Ayu Rakhma Wuryandin tahun 2022, dengan judul penelitian Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Gorontalo. Alat Analisa SPSS,19 dengan jumlah sampel sebanyak 67 orang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada pegawai di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan 1) standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan 3) standar akuntansi pemerintah dan

kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Harry Apriansyah¹, Sri Rahayu², Misni Erwati³, tahun 2020, judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo, Alat Analisa: SPSS.22. jumlah responden sebanyak 36 orang.

Hasil pengujian kualitas instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan valid dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua data memenuhi persyaratan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penggunaan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo dan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Sella Antika Purboraras tahun 2022 dengan judul penelitian : Pengaruh kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Alat Analisa, SEM.

Dengan jumlah sampel 75 orang. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini meliputi seluruh pegawai pada bagian keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar. Sampel yang digunakan adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala dan staf bagian keuangan atau akuntansi. Kuesioner dibagikan kepada 75 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM- PLS (*Structural Equation Modeling - Partial Least Square*) dengan menggunakan alat bantu program Smart PLS ver. 2.0 M3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan pelatihan pegawai memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Restika Eklesia Mene¹ , Herman Karamoy² , Jessy D.L.Warongan, tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Alat Analisa, SPSS,²⁴ dengan jumlah responden 76 orang dari 28 OPD, Analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda statistik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi teknologi dan sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Magfirah Imalia* ¹ , Indrawan Azis² , Nur Rachma³ dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. Alat Analisa yang digunakan SPSS 29, dengan

jumlah responden sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel Penerapan Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Adapun variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bersama-sama berpengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Widya Mutiara Ningrum, dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Dan Kabupaten Magelang). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 116, berdasarkan metode purposive sampling, yaitu pegawai yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan, staf keuangan dan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun, serta Pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif. Sedangkan, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chodijah, dan Nurul Hidayah, tahun 2018 dengan judul Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah

bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 23 SKPD dengan kriteria Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Karna itu, analisis data yang digunakan adalah analisis dalam bentuk uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan pada variable pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Secara parsial menunjukan hasil pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari uji parsial (Uji t).

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka konseptual tersebut di atas, maka dapatlah di buat hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Teori yang digunakan pada variabel ini adalah teori keagenan(Agency) yang di duga bahwa faktor Standar Akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada

BPKAD Provinsi Papua, secara khusus pada bidang akuntansi dan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Widya Mutiara Ningrum, tahun 2019 dan Magfirah Imalia* 1 , Indrawan Azis² , Nur Rachma³ (2023).

2.3.2 Sistem Pengendalian Internal

Teori yang digunakan pada variabel ini adalah teori keagenan (Agency) yang Di duga bahwa Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Bidang Anggaran dan akuntansi pada BPKAD Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widya Mutiara Ningrum tahun 2019.

2.3.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teori yang digunakan pada variabel ini adalah teori keagenan (Agency) yang di duga bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Bidang Anggaran dan Akuntansi pada BPKAD Provinsi Papua, Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Magfirah Imalia* 1 , Indrawan Azis² , Nur Rachma³.

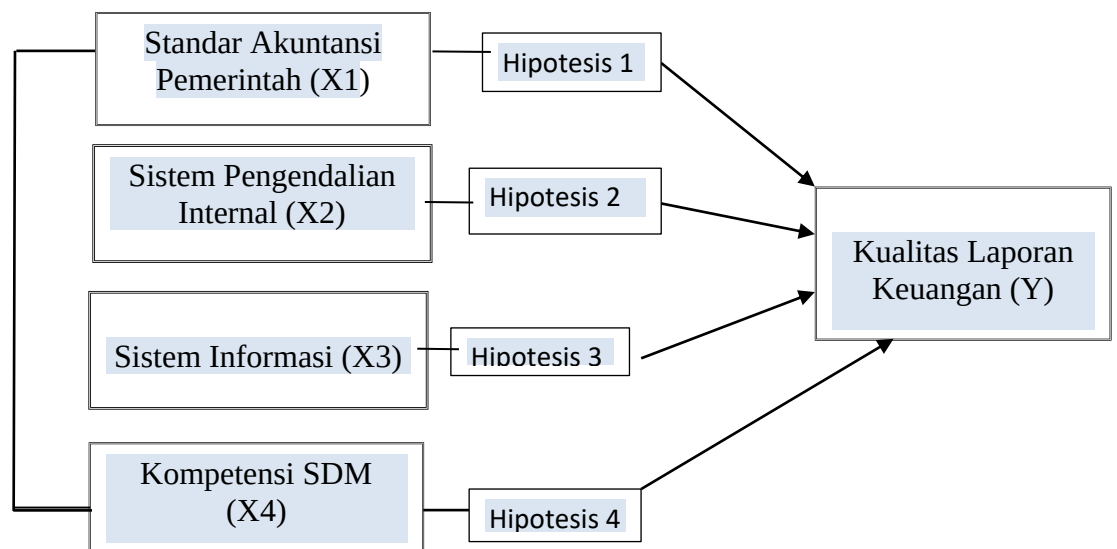
2.3.4 Kompetensi Sumber daya Manusia

Teori yang digunakan pada variabel ini adalah teori keagenan (Agency) yang di duga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada bidang Akuntansi dan Anggaran pada BPKAD Provinsi Papua, Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Harry Apriansyah, Sri Rahayu², Misni Erwati³.

2.4 Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Standar Pemerintah, Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 model penelitian



Sumber : Penulis, 2024